



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI WIYANI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **212056**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.425.515.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/50 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 69.200.000
2. Tanah Seluas 2960 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 105.560.000
3. Tanah Seluas 2520 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.720.000
4. Tanah Seluas 1500 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 52.560.000
5. Tanah Seluas 1420 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.880.000
6. Tanah Seluas 3035 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 864.975.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 938 m²/102 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 151.620.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 278.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	88.891.712
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.792.406.712
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.792.406.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.